PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang :

a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 31 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil perlu disesuaikan ;

b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf (a), perlu mengatur kembali Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Staadsblad Tahun 1917 Nomor 130 Jo. Staadsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglemen Catatan Sipil Golongan Cina ;
2. Staadsblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo. Staadsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk beberapa golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura ;
3. Staadsblad Tahun 1933 Nomor 75 Jl. Staadsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk orang Indonesia Nasrani, Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparan, dan Badan Tanpa Pulau-pulau Telun, Nila dan Serun ;
4. Staadsblad Tahun 1949 Nomor 25 tentang Reglemen Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan Mereka yang dipersamakan ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing ;
6. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing ;
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
11. Kecamatan adalah Lingkungan Kerja Perangkat Pemerintah Wilayah Kecamatan yang meliputi beberapa Desa / Kelurahan ;
12. Desa / Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintah terendah dibawah Kecamatan dalam Kabupaten Sidoarjo ;
13. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia Orang Asing yang menetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
14. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berdiam sementara dan tidak menetap dalam Wilayah Republik Indonesia ;
15. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar daerah Kabupaten Sidoarjo dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi Penduduk Kabupaten Sidoarjo ;
16. Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) yaitu suatu Kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga ;
17. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) wajib bagi setiap penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia yang berusia 17 Tahun atau yang telah pernah kawin ;
18. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah kartu identitas sementaara WNI yang datang dari luar Kabupaten Sidoarjo dengan maksud mencari nafkah / pekerjaan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi Penduduk Kabupaten Sidoarjo ;
19. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut SKPPS adalah bukti diri bagi orang asing yang berdiam sementara atau tidak menetap dalam suatu wilayah Kabupaten Sidoarjo ;
20. Akte Catatan Sipil adalah Akte otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai dokumen negara ;
21. Kutipan Akte adalah catatan pokok yang dikutip dari Akte Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama ;
22. Kutipan Akte Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akte Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo karena kutipan Akte yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib ;
23. Salinan Akte adalah salinan lengkap isi Akte Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah atas permintaan pemohon ;
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL

Pasal 2

(1) Setiap penduduk, penduduk musiman dan penduduk sementara yang bertempat tinggal di wilayah Daerah, wajib mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Kepala Desa/Kelurahan setempat untuk memiliki Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Kartu Identitas Penduduk Musiman ;

(2) Setiap penduduk yang telah kawin wajib memiliki Kartu Keluarga tersendiri ;

(3) Setiap penduduk wajib melaporkan atas terjadinya perubahan karena pindah, kelahiran, perkawinan, kematian dan perubahan kewarganegaraan atau ganti nama yang ada ditempat tinggalnya ;

(4) Tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut Retribusi terhadap Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap orang yang mendapat pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 5

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapat Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

B A B IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

B A B VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

B A B VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipungut di Wilayah Daerah.

B A B X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

B A B XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminsitrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang ;

(2) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi ;

(3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

B A B XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;

(2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 18

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, diterbikan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran reribusi ;

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XVI
KADALUWARSA

Pasal 20

(1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 21

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B XVIII
PENGAWASAN

Pasal 22

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XIX
PENGECUALIAN

Pasal 23

Kewajiban pendaftaran penduduk dan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing dan anggota Organisasi Internasional beserta keluarga.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XXI
PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilkaukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orangpribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

i. Memanggil orang untuk didengan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

DUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
PADA TANGGAL 22 NOPEMBER 2001 NOMOR 3 TAHUN 2001 SERI B.

An. BUPATI SIDOARJO
Sekretaris Daerah Kabupaten
S I D O A R J O

ttd

Drs. Ec. SALAM
Pembina Utama Muda
Nip. 510 027 150

SALINAN SESUAI ASLINYA
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Drs. AHMAD SUJIYANTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 120 774

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 16 TAHUN 2001
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2001

RETRIBUSI PENGGANTIAN BEAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

1.	Kartu Tanda Penduduk :	
	▪ Untuk WNI	Rp 5.000,00
	▪ Untuk WNA	Rp 10.000,00
2.	Kartu Tanda Penduduk Musiman	Rp 1.500,00
3.	Kartu Keluarga	Rp 2.500,00
4.	Surat Keterangan pelaporan Warga Negara Asing menjadi Warga Negara :	
	▪ Kepala Keluarga	Rp 5.000,00
	▪ Istri	Rp 4.000,00
	▪ Anak	Rp 2.500,00
5.	Surat Keterangan Pelaporan Warga Negara Asing :	
	▪ Kepala Keluarga	Rp 5.000,00
	▪ Istri	Rp 4.000,00
	▪ Anak berusia 16 tahun ke atas	Rp 2.500,00
	▪ Anak berusia 16 tahun ke bawah	Rp 2.000,00
6.	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara	Rp 10.000,00
7.	Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran Warga Negara Indonesia	Rp 5.000,00
8.	Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran Warga Negara Asing	Rp 7.500,00
9.	Surat Keterangan Pindah	Rp 1.500,00
10.	Surat Keterangan Pindah Domisili Warga Negara Asing	Rp 5.000,00
11.	Surat Keterangan Ganti Nama	Rp 5.000,00
12.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran :	
	▪ Untuk Warga Negara Indonesia	Rp 15.000,00
	▪ Untuk Warga Negara Asing	Rp 40.000,00
13.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	Rp 10.000,00
14.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Pengangkatan Anak :	
	▪ Untuk Warga Negara Indonesia	Rp 40.000,00
	▪ Untuk Warga Negara Asing	Rp 60.000,00
15.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Pengesahan Anak	Rp 25.000,00
16.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Perkawinan :	
	▪ Untuk Warga Negara Indonesia	
	o Di dalam kantor	Rp 25.000,00
	o Di luar kantor	Rp 40.000,00
	▪ Untuk Warga Negara Asing	
	o Di dalam kantor	Rp 40.000,00
	o Di luar kantor	Rp 75.000,00
17.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Perceraian	Rp 25.000,00
18.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akte Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama :	
	▪ Untuk Warga Negara Indonesia	Rp 35.000,00
	▪ Untuk Warga Negara Asing	Rp 90.000,00
19.	Ijin Dispensasi Perkawinan sebelum batas waktu ketentuan pengumuman :	
	▪ Untuk Warga Negara Indonesia	Rp 10.000,00
	▪ Untuk Warga Negara Asing	Rp 25.000,00
20.	Pengumuman perkawinan :	
	▪ Di Kabupaten Sidoarjo	Rp 5.000,00
	▪ Di Luar Kabupaten Sidoarjop	Rp 10.000,00
21.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap :	
	▪ Untuk Warga Negara Indonesia	Rp 35.000,00
	▪ Untuk Warga Negara Asing	Rp 75.000,00
22.	Pencatatan perubahan status kewarganegaraan/ ganti nama setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri	Rp 25.000,00

23.	Kutipan Akte kelahiran kedua dan seterusnya :		
	▪ Untuk Warga Negara Indonesia	Rp	8.000,00
	▪ Untuk Warga Negara Asing	Rp	25.000,00
24.	Kutipan Akte perkawinan kedua dan seterusnya :		
	▪ Untuk Warga Negara Indonesia	Rp	10.000,00
	▪ Untuk Warga Negara Asing	Rp	30.000,00
25.	Perbaikan Akte Kelahiran	Rp	5.000,00
26.	Kutipan Akte Pengangkatan anak kedua dan seterusnya	Rp	20.000,00
27.	Kutipan Akte Kematian kedua dan seterusnya	Rp	15.000,00

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

ttd

II. WIN HENDRARSO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL

I. Penjelasan Umum

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Rwpublik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Dacrah, perlu ditetapkan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Caatatan Sipil di Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1 s/d 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

ayat (2) huruf b :
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh :
  - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
  - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 21 s/d 28 : Cukup Jelas.